LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
BULAN APRIL 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Jl. Prof.Moh. Yamin N0. 52 Palu Kode Pos 94231

Telp.0451 - 483385Fax. 0451- 483385

Website: ptunpalu.go.id

Email: ptunpalu@gmail.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi 2

Bab I Pendahuluan 4

A. Sejarah Singkat..... 4

B. Maksud dan Tujuan 6

Bab II Tugas Pokok dan Fungsi 7

A. Manajemen Kesekretariatan 7

1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 7

1.1. Struktur Organisasi 8

1.2. Sumber Daya Manusia 9

1.3. Promosi, Mutasi dan Pensiun 10

1.4. Pengelolaan Database dan Sikep 11

2. Umum dan Keuangan 13

2.1. Tata Kearsipan dan Perpustakaan 12

2.1.1. Pengelolaan Persuratan 12

2.1.2. Pengelolaan Perpustakaan 13

2.1.3. Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan 13

2.2. Pengelolaan Aset dan BMN 13

2.2.1. Data Tanah, Gedung dan Kendaraan 14

2.2.2. Penetapan Status dan Penggunaan BMN 13

2.2.3. Pengalihan dan Penghapusan BMN 15

2.3. Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara 16

2.3.1. Laporan Realisasi Anggaran 16

2.3.2. Laporan PNBP 17

2.3.3. Data Persekot/Uang Muka Gaji 17

2.3.4. Ralat SPM.....17

3. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 18

3.1. Revisi DIPA/POK 18

3.2. Pengelolaan Website dan Jaringan 18

B. Manajemen Kepaniteraan 19
1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara 19
1.1. Laporan Keadaan Perkara 19
1.2. Laporan Jenis Perkara 19
1.3. Laporan Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding, Kasasi dan PK 20
2. Laporan Pelaksanaan SIPP 20
3. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan 20
4. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum 22
5. Tata Kelola Arsip Perkara 22
BAB III Kesimpulan dan Rekomendasi 23
A. Kesimpulan 23
B. Rekomendasi 23
LAMPIRAN 26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 2 Tahun 1997 Tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1997 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Hi. Soeharto

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu merupakan Pengadilan Type kelas I yang berkedudukan di Kota Palu dan beralamat di Jl. Prof.Moh Yamin No 52 Palu.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang terjadi di Wilayah Hukumnya yang meliputi seluruh Wilayah Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi Tengah

Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi:

1. Kota Palu
2. Kabupaten Banggai
3. Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kabupaten Banggai Laut
5. Kabupaten Buol
6. Kabupaten Donggala
7. Kabupaten Morowali
8. Kabupaten Morowali Utara
9. Kabupaten Parigi Moutong
10. Kabupaten Poso
11. Kabupaten Tojo Una-Una
12. Kabupaten Sigi Biromaru
13. Kabupaten Toli-toli

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diresmikan bersama-sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, PTUN Bengkulu, PTUN Jambi, dan PTUN Kendari secara simbolis oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bapak Prof.Dr.Hi.Muladi,SH pada tanggal 29 Oktober 1998 yang dipusatkan di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor dan sekaligus ditandai dengan dimulainya beroperasi Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia .

Sejak beroperasi pada tahun 1998 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengalami pergantian pucuk Pimpinan sebanyak Tiga belas(13) kali yaitu sebagai berikut:

1. JACOB GERUNGAN, SH (1998 s/d 1999)
2. SUTOYO, SH (1999 s/d 2001)
3. SULISTYO, SH (2001 s/d 2002)
4. ACHMAD HUSEIN, SH (2003 s/d 2006)
5. DILMAR TATAWI, SH (2006 s/d 2007)
6. KAMER TOGATOROP, SH.M.AP (2007 s/d 2010)
7. NABARI SEMBIRING, SH (2010 s/d 2011)
8. Hi. ASMORO BUDI SANTOSO, SH (2011 s/d 2012)
9. Hi. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH (2012 s/d 2015)
10. FARI RUSTANDI, SH, MH (2015 s/d 2020)
11. NUR AKTI, S.H. (2020 s/d 2021)
12. SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H. (2022 s/d 2023)
13. DANAN PRIAMBADA, S.H.,M.H. (2023 s/d Sekarang)

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi Wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Peradilan Tata Usaha Negara yang berada diwilayah hukumnya dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Manajemen Kesekretariatan

1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Peradilan dibawahnya. Susunan Struktur Organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
STRUKTUR ORGANISASI
(Sesuai PerMA No. 7 Tahun 2015)

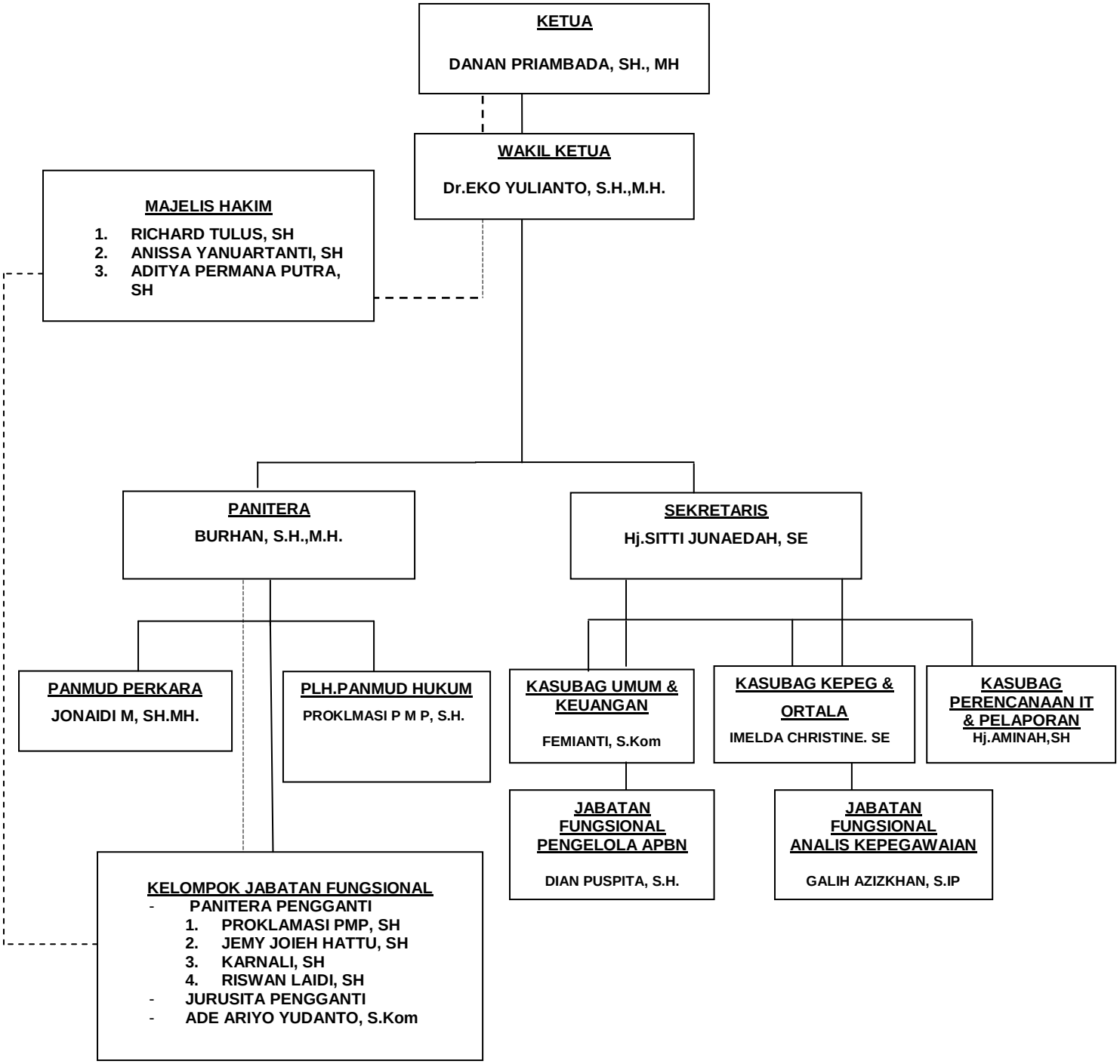

1.2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pejabat Fungsional dan Struktural, Pegawai, dan Honorer (PPNPN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

Ketua	:	1 orang
Wakil Ketua	:	1 orang
Hakim	:	3 orang
Panitera	:	1 orang
Sekretaris	:	1 orang
Panitera Muda Perkara	:	1 orang
Panitera Muda Hukum	:	-
Kasub Kepegawaian dan Ortala	:	1 orang
Kasub Umum dan Keuangan	:	1 orang
Kasub Perencanaan IT dan Pelaporan	:	1 orang
Fungsional Kepegawaian dan Ortala	:	1 orang
Fungsional Pengelola Keuangan APBN	:	1 orang
Panitera Pengganti	:	4 orang
Pelaksana Kepaniteraan Perkara	:	1 orang
Pelaksana Umum dan Keuangan	:	1 orang
Honorer (PPNPN)	:	11 orang

Sedangkan susunan personil Pegawai dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Gol
1	Ketua	Danan Priambada, SH.,MH	IVc
2	Wakil Ketua	Dr.Eko Yulianto, S.H.,M.H.	IV/b
5	Hakim	Richard Tulus, S.H.	III/a
6	Hakim	Anissa Yanuartanti, S.H.	III/a
7	Hakim	Aditya Permana Putra, S.H.	III/a
8	Sekretaris	Hj. Sitti Junaedah, S.E.	IV/b
9	Panitera	Burhan, S.H.,M.H.	IV/a
10	Panmud Perkara	Jonaidi M, S.H., M.H.	III/d
11	Panmud Hukum	-	-
12	Kasub Perencanaan IT & laporan	Hj. Aminah,S.H.	III/d
13	Kasub Umum & Keuangan	Femianti, S.Kom	III/b
14	Kasub Kepegawaian, Ortala	Imelda Christine, S.E.	III/d
15	Panitera Pengganti	Proklamasi PMP, Hambuako,S.H.	III/c
16	Panitera Pengganti	Jemmy Joeh Hattu, S.H.	III/c
17	Panitera Pengganti	Karnali, S.H.	III/a
18	Panitera Pengganti	Riswan Laidi, S.H.	III/a
19	Fungsional Kepegawaian dan Ortala	Galih Azizkhan, S.IP	III/a
20	Fungsional Pengelola APBN	Dian Puspita, S.H.	III/a
21	Jurusita Pengganti	Ade Ario Yudanto, S.Kom	II/c

Secara lengkap data personil Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dapat dilihat pada lampiran daftar urut kepangkatan (DUK).

Jabatan fungsional yang diperbantukan pada Jabatan Administrasi:

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Jabatan Fungsional yang diperbantukan pada Jabatan Administrasi

No	Nama	Jabatan	Perbantukan
1	-	-	-

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Tenaga Honorer (PPNPN)

No	Nama	Tugas	Perbantukan
1	Frangky Atimang	Satpam	Hukum
2	Samsul Bahri	Satpam	Hukum
3	Faldy Abraham	Satpam	Hukum&Umum Keuangan
4	Sukarno	Satpam	Umum & Keuangan
5	Moh Fauzan,S.Pd.I,S.H.	Sopir	Perkara& Admin SIPP
6	Ulil Amri, S.E.	Sopir	Umum & Keuangan
7	Ade Chandra Permana,S.SI	Pramubakti	Umum & Keuangan
8	Moh Fachri Darmawan, S.H.	Pramubakti	PerencanaanTI&Pelaporan
9	Achmad Reyzha	Pramubakti	Umum & Keuangan
10	Nur Ramadhan, A.Md.MI., S.H.	Pramubakti	PerencanaanTI&Pelaporan
11	Winda,S.E	Pramubakti	Kepegawaian & Ortala

1.3. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Pejabat dan atau pegawai yang mendapat promosi atau mutasi adalah sebagai berikut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Data Mutasi 2024

No	Nama	Asal Mutasi	Mutasi
1.	.Wardi, S.E	PTUN Palu	PTTUN Makassar

Pejabat dan atau pegawai yang memasuki masa pensiun adalah sebagai berikut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Data Promosi dan Mutasi

No	Nama	Masa Kerja	TMT Pensiun
-	-	-	-

1.4. Pengelolaan Database SIKEP

Database SIKEP dikelola oleh Kasub Kepegawaian dan Ortala sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Pemutakhiran database SIKEP dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh Saudari Imelda Christine, S.E. Sebagai user administrator satuan kerja.

Hasil rekapitulasi kelengkapan database pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada aplikasi Sikep adalah sebagai berikut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Rekapitulasi Database Sikep

No	Nama Pegawai	Status	Keterangan
1.	Danan Priambada, S.H.,M.H.	Lengkap	-
2.	Dr.Eko Yulianto, S.H.,M.H.	Lengkap	-
3.	Richard Tulus, SH	Lengkap	-
4.	Anissa Yanuartanti, SH	Lengkap	-
5.	Aditya Permana Putra, S.H.	Lengkap	-
6.	Hj.Sitti Junaedah,S.E	Lengkap	-
7.	Burhan, S.H.,M.H.	Lengkap	-
8.	Jonaidi M, S.H.,M.H.	Lengkap	-
9.	Hj.Aminah, S.H	Lengkap	-
10.	Imelda Christine, S.E	Lengkap	-
11.	Femianti, S.Kom	Lengkap	-
12.	Proklamasi P.M.P, S.H	Lengkap	-
13.	Jemmy Joieh Hattu,S.H	Lengkap	-
14.	Karnali, S.H	Lengkap	-
15.	Riswan Laidi,S.H	Lengkap	-
16.	Dian Puspita, S.H	Lengkap	-
17.	Galih Azizkhan,S.IP	Lengkap	-
18.	Ade Ariyo Yudanto, A.Md. Kom	Lengkap	-

2. Umum dan Keuangan

2.1. Tata Kearsipan dan Perpustakaan

2.1.1. Pengelolaan Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat Masuk dan Surat Keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian Umum dan Keuangan. Data statistik surat masuk dan surat keluar periode April 2024:

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Data Surat Masuk dan Surat Keluar

No	Bagian	Jumlah	
		Surat masuk	Surat keluar
	Kesekretariatan	-	-
1	Ketua	20	36
2	Sekretaris	4	22
	Kepaniteraan	-	-
1	Ketua	2	2
2	Panitera	18	7
	Jumlah	**44**	**67**

2.1.2. Pengelolaan Perpustakaan

Tanggungjawab pengelolaan perpustakaan dibawah kendali Umum dan Keuangan dan sebagai petugas Kepustakaan (pustakawan) telah ditunjuk 2 (dua) orang PPNPN sebagai petugas pengelolaan perpustakaan sesuai dengan Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor. W4-TUN5/158.a/PS.00/IV/2019 tanggal 29 April 2019 Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan April 2024 berjumlah (909) buah. Pengelolaan data base perpustakaan belum dilakukan kedalam buku register pustaka. Pengelolaan database secara elektronik sudah dilakukan melalui aplikasi ***SLIM Senayan.*** Untuk pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi sebagian telah dilakukan.

2.1.3. Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan

Perlengkapan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih sangat kurang. Sarana dan Prasarana yang tersedia baru terbatas pada penyediaan Ruangan khusus perpustakaan, lemari arsip buku. Sedangkan meja dan kursi petugas dan meja baca untuk pengunjung belum tersedia.

2.2. Pengelolaan Aset dan BMN

2.2.1. Data Tanah, Gedung dan Kendaraan

- Luas Tanah Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu seluas 3.250 m2 sedangkan luas tanah rumah dinas seluas 2123 m2.
- Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah selesai renovasi sehingga pada tanggal 06 November 2023 titik koordinat lokasi kantor kembali ke Jalan Prof Moh Yamin No 52 palu.

- Data Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai berikut:

No	Type	Tahun	Luas Tanah	Luas Bangunan
1	C Permanen	1996	265 m2	77 m2
2	C Permanen	1996	265 m2	77 m2
3	C Permanen	1996	265 m2	77 m2
4	C Permanen	1996	265 m2	77 m2
5	C Permanen	1996	265 m2	77 m2
6	C Permanen	1996	265 m2	77 m2
7	C Permanen	2003	265 m2	77 m2
8	C Permanen	2003	265 m2	77 m2

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berkut:

1. Rumah dinas type Cluas bangunan :77 m2 untuk Ketua
2. Rumah dinas type Cluas bangunan :77 m2 untuk Wakil Ketua
3. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m2 untuk Hakim
4. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m2 untuk Hakim
5. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m2 untuk Hakim
6. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m2 untuk Hakim
7. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m2 untuk Sekretaris
8. Rumah dinas type C luas bangunan :77m2 untuk Panitera.

- Kenderaan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terdiri dari roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dan sudah dibuatkan SK Penggunaan Kenderaan Dinas.
- Data kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai berikut:

No	Nama Aset	Tahun	Kondisi	Pengguna
1	Toyota Vios	2007	RR	Ketua
2	Toyota KF 80	2001	RB	Sekretaris / Operasional
3	Honda NF 125 D	2006	RR	Panmud Perkara
4	Honda Supra 125 SFC	2007	Baik	Panmud Hukum
5	Honda Revo	2009	Baik	Panitera
6	Honda Revo	2009	Baik	Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan
7	Honda Revo	2009	Baik	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
8	Honda Supra NF 125 TRF	2008	Baik	Kasubbag Umum dan Keuangan
9	Honda GL Pro	2006	RR	Panitera Pengganti

2.2.2. Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Mengacu pada PMK Nomor: 22/KM.6/WKN.16/KNL.03/2014 tentang penetapan status BMN dan Perma Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang penetapan status BMN serta berdasar usulan penetapan status BMN pada Pengadlan Tata Usaha Negara Nomor: 87 Tahun 2016 tentang penetapan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : W4-TUN5/178/PL.07/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 telah diterbitkan SK penetapan status BMN atas Tanah dan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 22/KM.6/WKN.16/KNL.03/2014 Tanggal 04 Juni 2014 dan terakhir penetapan status BMN Nomor: 40/SEK/SK/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan berdasarkan Surat Edaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang pengelolaan aset BMN harus diterbitkan Ijin penggunaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang.

2.2.3. Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

- Tidak ada pengalihan status Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1076/SEK/SK/VIII/2022 Tentang Penghapusan Barang MilikNegara/Kekayaan Negara berupa gedung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan pos belanja:

Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan April 2024

No	Belanja	DIPA (005.01)	Realisasi		Sisa
			Bulan ini	S/d Bln ini	
1	Pegawai(51)	3.869.639.000,-	202.003.662,-	1.046.732.842,-	2822.906.158,-
2	Barang(52)	1.228.257.000,-	78.244.891,-	292.547.255,-	935.709.745,-
3	Modal(53)	0,-	0,-	0,-	0,-

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan pos belanja:

Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan April 2024

No	Belanja	DIPA (005.05)	Realisasi		Sisa
			Bulan ini	S/d Bln ini	
1	Pegawai(51)	0,-	0,-	0,-	0,-
2	Barang (52)	51.910.000,-	5.950.000,-	10.575.000,-	41.335.000,-
3	Modal (53)	0,-	-	-	-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran

2.2.3. Laporan PNBP

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode Bulan April 2024 secara umum sebagai berikut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Realisasi Penerimaan PNBP

No	Akun	Jenis Pendapatan	Bln lalu	Bln ini
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	892.800,-	892.800,-
2	423911	Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3	423991	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0
4	425232	Uang Meja (Leges)	80.000,-	40.000,-
5	425233	Ongkos Perkara	500.000,-	260.000,-
6	425239	Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	3.655.000,-	525.000,-
		Total	5.127.800,-	1.717.800,-

Laporan realisasi PNBP secara rinci dapat dilihat pada tabel lampiran.

2.2.4. Data persekot/Uang Muka Gaji

Tidak ada Pegawai dan Hakim mengajukan persekot gaji pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

2.2.5. Ralat SPM

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak melakukan ralat SPM

3. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

3.1. Revisi DIPA/POK

Untuk Revisi Dipa 01 saat ini (satu) kali revisi dan Dipa 05 belum direvisi. Pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah 1-144/KMA/SK/I/2011, 2-144/KMA/SK/VII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 257/DjMT/KEP.02.3/XII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi dan komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Mengenai dasar pembuatan Situs Mahkamah Agung. Alamat website Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dapat diakses di www.ptun-palu.go.id.

3.2. Pengelolaan Website dan Jaringan

Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggungjawab pengelolaan ada pada Kasubag PTIP, Indihome dengan kapasitas 100 MB dengan pengaturan Mikrotik termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP sebesar 100 MB dan Astinet Dedicated sebesar 10 MB dengan kontrak berlangganan antara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan PT Indonesia Comnets Plus (PLN GROUP). Tentang Penyediaan Layanan Dedicated 25 Mbps & Broadband 100 Mbps. Nomor : 3474/012/BAKBB/PJL/ICON+/202. Tipe Permintaan layanan baru.

B. Manajemen Kepaniteraan

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode Bulan April 2024 sebagai berikut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Laporan Keadaan Perkara

No	Perkara	Sisa Bln lalu	Masuk bln ini	Putus bln ini	Sisa sd bln ini	Keterangan			
						Cabut	Gugur	PLW	Dismisal
1	Gugatan	24	7	4	27	-	-	-	-
2	Banding	32	2	2	27	-	-	-	-
3	Kasasi	37	-	-	37	-	-	-	-
4	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode Bulan April 2024 sebagai berikut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Laporan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Sisa bln lalu	Cabut	Dissmisal	Masuk bulan ini	dikabulkan	Tidak diterima	Sisa bln ini
1	Pertanahan	3	-	-	2	-	-	5
2	Kepegawaian	1	-	-	1	-	-	1
3	Perizinan	1	-	-	4	-	-	5
4	Lingkungan Hidup	-	-	-		-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang & Jasa	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum /Parpol	-	-	-	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	5	-	-	1	-	-	6
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-		-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-
10	Pergantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	-	-	-	-	-	-	-
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	10	-	-	5	-	-	15
17	Merek	-	-	-	-	-	-	-
18	Lain-lain	1	-	-	1	-	-	1
	Total	**21**	**-**	**-**	**14**	**-**	**-**	**33**

1.3. Laporan jumlah perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode Bulan April 2024 sebagai berikut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Laporan Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum

No	Perkara yang tidak mengajukan:	s/d Bln Lalu	Masuk Bulan Ini	Putus	s/d Bln ini
1	Banding	27	-	-	27
2	Kasasi	37	-	-	37
3	Peninjauan Kembali	2	-	-	2
	Total	**66**	**-**	**-**	**66**

2. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggungjawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh stake holder yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah SIPP Versi 5.4.0 Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan April 2024 adalah sebesar ***42.86%*** (***data dari SIPP MA***). Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah Jaringan Internet sedangkan hambatan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia.

3. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SK KMA No. 1-144KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah memiliki sarana meja pengaduan, dan petugas pengaduan sudah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : W4/TUN5/255/OT.00/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022. Sarana lainnya adalah tersedianya buku register meja informasi, blangko-blangko permohonan. Permohonan informasi yang masuk ke Pengadiilan Tata Usaha Negara Palu periode bulan April 2024 nihil.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Buku Register Meja Informasi

No	Pemohon	Tgl diterima	Obyek pemohon	Tindak Lanjut
1				
2	N	I H	I	L

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah menyiapkan sarana meja pengaduan yang berada di Meja PTSP. Fasilitas lainnya adalah TV Media, Meja Informasi, Kursi, Penanggungjawab dan petugas meja pengaduan telah ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : W4/TUN5/255/OT.00/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SPAN sudah menggunakan aplikasi Whiste Blowing System Mahkamah Agung RI yaitu aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI). Jumlah pengaduan Pada Bulan April 2024 yang telah masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah Nihil.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Buku Register Meja Pengaduan

No	Sumber Pengaduan	Tgl diterima	Subyek	No. Register
1	Surat		Pelanggaran kode etik	
1	N I	H	I	L
2				
3	Dst...			

4. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat/ Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam perjajian kerjasama Kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Lembaga Pemberi layanan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekolompok orang diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Laporan penyerapan Anggaran Posbakum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dapat dilihat pada lembar lampiran.

5. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan kedalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada kepaniteraan perkara, sedangkan arsip perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Muda Hukum. Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Muda Hukum ke tempat ruang penyimpanan arsip perkara.

Ruang arsip perkara terletak disamping ruangan panmud perkara dan telah dilakukan pelabelan nomor perkara pada berkas perkara yang sudah incracht.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Hukum Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
2. Perkara / Sengketa Tata Usaha Negara yang telah Masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu umumnya mengenai kasus-kasus Pertanahan, Tindakan Faktual Kepegawaian, Kepala Desa dan Perangkat Desa/ lain-lain.
3. Tertibnya pelaksanaan Administrasi dan berjalannya sistem Peradilan yang baik tidak dapat terlepas dari optimalisasi sumber daya manusia yang tersedia, penempatan personil sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.

B. Rekomendasi

Seiring dengan perubahan Struktur Organisasi di Empat Lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi karena adanya pemisahan Jabatan Panitera dan Sekretaris. Penggabungan Sub Bagian Umum dan Keuangan dan adanya Penambahan Sub bagian Perencanaan serta dibagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana akan menambah beban pekerjaan di masing-masing sub bagian tersebut. Disisi lain jumlah Personil bagian Kesekretariatan maupun Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak pernah ada penambahan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pencapaian target kinerja masing-masing bagian.

Sebagai Langkah antisipasi dalam upaya mengatasi permasalahan pegawai tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memperbantukan tenaga honorer seperti Satpam, Pramubakti dan Sopir untuk di tempatkan di sub-sub bagian sebagai tenaga staf administrasi, karena tenaga staf di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sangat kurang.

Luasnya Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Kondisi tofografi Wilayah Sulawesi Tengah yang dipenuhi pegunungan yang tinggi menyebabkan sulitnya jalur transportasi darat antar kabupaten. Untuk itu dalam upaya pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten dituntut tersedianya sarana Prasarana serta kemampuan sumber daya manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana Peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan sebagai berikut :

1. Dengan keterbatasan sumber daya manusia tidak adanya staf pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. **Sangat diharapkan realisasi penambahan Pegawai Golongan II dan Golongan III** di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Yang dalam hal ini, **pengangkatan Pegawai Honorer yang diperbantukan sebagai staf di sub bagian masing-masing, dan sangat membantu melaksananakan tugas dan tanggungjawab**.
2. Diharapkan Penambahan 4 (empat) unit Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) untuk Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris, dan Kendaraan Operasional Dinas roda 2 (dua) sebanyak 4 (empat) unit untuk kendaraan Kepala Sub bagian dan Jurusita Pengganti dalam upaya kelancaran aktifitas kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Demikian Laporan Bulanan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Palu, 2 Mei 2024

Wakil Ketua,

Eko Yulianto

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBP DIPA 005.05

Lampiran 1 : Tabel Daftar Urut Kepangkatan

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 3 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBP DIPA 005.01

Lampiran 5 : Laporan Realisasi PNBP DIPA 005.05

Lampiran 6 : Daftar Persekot/Uang Muka Pegawai (jika ada)

Lampiran 7 : Ralat SPM (jika ada)

Lampiran 8 : Daftar Revisi DIPA/POK (jika ada)

Lampiran 9 : Laporan Penyerapan Anggaran Posbakum